



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI RABU, 3 JUNI 2026

## RINGKASAN BERITA HARI INI



Ketua H. Abdillah Nashir, Wakil Ketua Suyarno, S.H., M.H., Wakil Ketua H. Kayan, SH, Wakil Ketua Warih Andono, SE

Dorong Penuntasan Lahan Selesai Tahun 2026

### DPRD Sidoarjo Dukung Pembangunan Flyover Gedangan Dipercepat

Sidoarjo, Memorandum

Pembka Sidoarjo menargetkan pembebasan lahan Flyover Gedangan tuntas akhir 2026. Dengan begitu, flyover yang diharapkan bisa mengurai kemacetan Gedangan dan sekitarnya bakal dimulai 2027.

Rencana ini mendapat dukungan dari DPRD Sidoarjo. Kalangan wakil rakyat mendorong penuntasan lahan Flyover Gedangan tahun 2026. Dan, mendesak agar proyek Flyover Gedangan dimulai 2027.

Seperti dikemukakan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dari PDI-P Suyarno, Politisi asal Prambon itu meminta agar lahan Flyover Gedangan dituntaskan tahun ini dan pembangunannya bisa dilakukan tahun depan.

"Sudah lama rakyat dihadapkan kemacetan dan keruwetan di perempatan Gedangan. Kalau Flyover Gedangan segera dioperasionalkan, paling tidak bisa mengurangi kemacetan di sana," ujar Suyarno.

Ia menyebutkan, bertahun-tahun rakyat menjerit ketika lewat perempatan Gedangan dan sekitarnya. Terutama saat jam berangkat kerja dan pulang kerja. Rakyat harus dihadapkan kemacetan parah. Padahal jalan ini adalah jalan utama yang menghubungkan Surabaya dengan



Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno.



Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat.



Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko.

Surabaya dengan Sidoarjo. Jumlah kendaraan dari hari ke hari juga terus bertambah. Karena itulah, salah satu solusi mengurai kemacetan di sana adalah dengan dibangun Flyover Gedangan.

"Pembangunannya lebih cepat lebih baik untuk mengurai kemacetan di sana. Begitu pembebasan lahan tuntas, Flyover Gedangan harus segera dibangun," urainya.

"Karena itulah kita mendorong agar lahan Flyover Gedangan bisa dituntaskan tahun ini dan proyeknya bisa dimulai tahun depan," ujarnya.

Ia menambahkan, dari hari ke hari kemacetan di perempatan Gedangan dan sekitarnya kian parah saja. Sebab ini adalah jalan utama yang menghubungkan

Surabaya dengan Sidoarjo. Jumlah kendaraan dari hari ke hari juga terus bertambah. Karena itulah, salah satu solusi mengurai kemacetan di sana adalah dengan dibangun Flyover Gedangan.

"Pembangunannya lebih cepat lebih baik untuk mengurai kemacetan di sana. Begitu pembebasan lahan tuntas, Flyover Gedangan harus segera dibangun," urainya.

"Karena itulah kita mendorong agar lahan Flyover Gedangan bisa dituntaskan tahun ini dan proyeknya bisa dimulai tahun depan," ujarnya.

Ia menambahkan, dari hari ke hari kemacetan di perempatan Gedangan dan sekitarnya kian parah saja. Sebab ini adalah jalan utama yang menghubungkan

Surabaya dengan Sidoarjo. Jumlah kendaraan dari hari ke hari juga terus bertambah. Karena itulah, salah satu solusi mengurai kemacetan di sana adalah dengan dibangun Flyover Gedangan.

"Pembangunannya lebih cepat lebih baik untuk mengurai kemacetan di sana. Begitu pembebasan lahan tuntas, Flyover Gedangan harus segera dibangun," urainya.

"Karena itulah kita mendorong agar lahan Flyover Gedangan bisa dituntaskan tahun ini dan proyeknya bisa dimulai tahun depan," ujarnya.

Ia menambahkan, dari hari ke hari kemacetan di perempatan Gedangan dan sekitarnya kian parah saja. Sebab ini adalah jalan utama yang menghubungkan



Bupati Sidoarjo Subandi menargetkan pembebasan lahan Flyover Gedangan tuntas akhir 2026.

Dalam agenda tersebut, Pembka Sidoarjo menargetkan pembebasan lahan selesai pada akhir 2026. Pembangunan Flyover Gedangan dimulai pada 2027.

Hadir dalam pertemuan itu Bupati Sidoarjo Subandi didampingi Kepala Dinas PUDASDA, Kepala Dinas Perkim CKTR, Camat, serta kepala desa. Turut hadir pula perwakilan BPN, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo, serta instansi terkait lain.

Subandi menegaskan, pembangunan Flyover Gedangan merupakan program prioritas

yang memerlukan keseriusan demi kepentingan masyarakat luas serta bagian dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Program ini juga telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Ada dukungan dari menteri hingga presiden.

Ia memastikan masyarakat tidak dirugikan dalam pembebasan lahan. Semua aset, baik tanah, bangunan, maupun tanaman, akan diganti sesuai nilai appraisal tertinggi.

"Kami pastikan masyarakat tidak dirugikan, justru diuntungkan. Semua akan diganti sesuai penilaian appraisal tertinggi

tanpa makelar. Pembka juga tidak bisa memengaruhi, dan nilai tertinggi yang akan digunakan. Kalau bapak/ibu membantu, kami juga akan membantu panjenengan semua," tegasnya. (adv/krl/jok/ter)

**KEHILANGAN**

HILANG STNK SEPEDA MOTOR HONDA REVU FIT 115CC - TAHUN 2025 WARNA HITAM - NOPOL-AD 4848 ABH ATAS NAMA - HEBTAWAN. Telp. 085234140104

HILANG STNK SEPEDA MOTOR HONDA VARIO 125CC - TAHUN 2021 WARNA BIRU - NOPOL-W 4780 NCB ATAS NAMA - KA BANGKOR. Telp. 0811025164723

### Pembka Bentuk Satgas Percepatan Ganti Rugi Lumpur

Sekda Ditunjuk Jadi Ketua

KOTA-Hampir dua dekade setelah semburan lumpur Porong terjadi, persoalan ganti rugi bagi sebagian korban masih belum tuntas. Untuk mempercepat penyelesaiannya, Pemerintah Kabupaten (Pembka) Sidoarjo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelesaian Ganti Rugi Korban Lumpur dengan menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai ketua tim.

Langkah tersebut diambil menyusul masih adanya ratusan berkas aset dan rumah warga terdampak yang belum mendapatkan pelunasan. Berdasarkan data Forum Korban Lumpur Sidoarjo, sekitar 200 berkas masih menunggu penyelesaian pembayaran. Dari jumlah itu, 32 berkas merupakan milik pelaku usaha, sedangkan sisanya milik warga terdampak.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, pembentukan satgas merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk membantu memper-



CARI SOLUSI: Bupati Sidoarjo Subandi saat menerima perwakilan PPLS dalam audiensi di Oparom Setda Kabupaten Sidoarjo, Selasa (2/6).

cepat penyelesaian persoalan yang telah berlangsung sejak 2006. "Biarkan ini betul-betul ada komitmen penyelesaian lumpur dan ganti rugi," ujar Subandi

menyempatkan. Kita membentuk satgas percepatan penyelesaian lumpur dan ganti rugi," ujar Subandi

usai audiensi dengan perwakilan Pusat Pengendalian Lumpur

● Ke Halaman 10

### Wabup Beri Dukungan Finalis Putri Pertiwi Jatim 2026 Asal SMPN 6

KOTA-Wakil Bupati Sidoarjo Mimik இதயம் memohon dukungan tim kepada Angkin Shalqumna Kusuma Anandhy, siswa SMP Negeri Sidoarjo yang berhasil lolos sebagai finalis ajang Putri Pertiwi Jawa Timur 2026. Dukungan tersebut disampaikan Wabup Mimik saat menerima informasi keberhasilan Angkin melalui ke tingkat provinsi, Selasa (2/6).

Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan prestasi yang membanggakan generasi muda Sidoarjo mampu bersaing dan berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.

Selamat kepada Angkin. Tampilan yang terbaik dan harmonis nama Kabupaten Sidoarjo di ajang Putri Pertiwi Jawa



PRESTASI: Wabup Sidoarjo Mimik இதயம் memohon dukungan pemerintah kepada Angkin Shalqumna Kusuma Anandhy.

mengembangkan potensi diri dan berani berkompetisi di berbagai bidang. "Prestasi ini diharapkan dapat memotivasi pelajar lain di Sidoarjo untuk terus berkarya, berprestasi, dan membawa nama baik daerah," katanya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, lanjut Mimik, berkomitmen memberikan dukungan kepada generasi muda yang memiliki prestasi dan potensi di berbagai bidang, baik akademik maupun nonakademik.

Dengan dukungan pemerintah daerah serta doa masyarakat Sidoarjo, Angkin diharapkan mampu meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Sidoarjo dalam ajang Putri Pertiwi Jawa Timur 2026. (sur/rya)

### Ganti Rugi Belum Lunas, Korban Lumpur Terpaksa Kredit Rumah

Pembka Bentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian. 0810000 - "Kedua-kedua ini harusnya selesai. Kalau belum selesai, itu berarti pemerintah belum menyelesaikan masalah ini," kata Ketua Tim Satgas Percepatan Penyelesaian Ganti Rugi Korban Lumpur Sidoarjo, H. Anang Siswandoko, Selasa (2/6).



0810000 - "Kedua-kedua ini harusnya selesai. Kalau belum selesai, itu berarti pemerintah belum menyelesaikan masalah ini," kata Ketua Tim Satgas Percepatan Penyelesaian Ganti Rugi Korban Lumpur Sidoarjo, H. Anang Siswandoko, Selasa (2/6).

0810000 - "Kedua-kedua ini harusnya selesai. Kalau belum selesai, itu berarti pemerintah belum menyelesaikan masalah ini," kata Ketua Tim Satgas Percepatan Penyelesaian Ganti Rugi Korban Lumpur Sidoarjo, H. Anang Siswandoko, Selasa (2/6).

0810000 - "Kedua-kedua ini harusnya selesai. Kalau belum selesai, itu berarti pemerintah belum menyelesaikan masalah ini," kata Ketua Tim Satgas Percepatan Penyelesaian Ganti Rugi Korban Lumpur Sidoarjo, H. Anang Siswandoko, Selasa (2/6).

0810000 - "Kedua-kedua ini harusnya selesai. Kalau belum selesai, itu berarti pemerintah belum menyelesaikan masalah ini," kata Ketua Tim Satgas Percepatan Penyelesaian Ganti Rugi Korban Lumpur Sidoarjo, H. Anang Siswandoko, Selasa (2/6).

### DPRD Sidoarjo Dukung Pembangunan Flyover Gedangan Dipercepat

Sidoarjo - HARIAN BANGSA Pembka Sidoarjo menargetkan pembebasan lahan Flyover Gedangan tuntas akhir tahun 2026. Dengan begitu, flyover yang diharapkan bisa mengurai kemacetan Gedangan dan sekitarnya bakal dimulai tahun 2027.

Rencana ini mendapat dukungan dari DPRD Sidoarjo. Kalangan wakil rakyat mendorong penuntasan lahan Flyover Gedangan tahun 2026. Dan, mendesak agar proyek Flyover Gedangan dimulai tahun 2027.

Seperti dikemukakan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dari PDI-P Suyarno, Politisi asal Prambon itu meminta agar lahan Flyover Gedangan dituntaskan tahun ini dan pembangunannya bisa dilakukan tahun depan.



Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno.



Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat.



Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko.

kemacetan dan keruwetan di perempatan Gedangan. Kalau Flyover Gedangan segera dioperasionalkan, paling tidak bisa mengurangi kemacetan di sana," ujar Suyarno.

Ia menyebutkan, bertahun-tahun rakyat menjerit ketika lewat perempatan Gedangan dan sekitarnya

Surabaya dengan Sidoarjo. Jumlah kendaraan dari hari ke hari juga terus bertambah. Karena itulah, salah satu solusi mengurai kemacetan di sana adalah dengan dibangun Flyover Gedangan.

Surabaya dengan Sidoarjo. Jumlah kendaraan dari hari ke hari juga terus bertambah. Karena itulah, salah satu solusi mengurai kemacetan di sana adalah dengan dibangun Flyover Gedangan.

"Pembangunannya lebih cepat lebih baik untuk mengurai kemacetan di sana. Begitu pembebasan lahan tuntas, Flyover Gedangan harus segera dibangun," urainya.

"Karena itulah kita mendorong agar lahan Flyover Gedangan bisa dituntaskan tahun ini dan proyeknya bisa dimulai tahun depan," ujarnya. (md/rus)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Dorong Penuntasan Lahan Selesai Tahun 2026

## DPRD Sidoarjo Dukung Pembangunan Flyover Gedangan Dipercepat

### Sidoarjo, Memorandum

Pemkab Sidoarjo menargetkan pembebasan lahan Flyover Gedangan tuntas akhir 2026. Dengan begitu, flyover yang diharapkan bisa mengurai kemacetan Gedangan dan sekitarnya bakal dimulai 2027.

Rencana ini mendapat dukungan dari DPRD Sidoarjo. Kalangan wakil rakyat mendorong penuntasan lahan Flyover Gedangan tahun 2026. Dan, mendesak agar proyek Flyover Gedangan dimulai 2027.

Seperti dikemukakan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dari PDI-P Suyarno. Politisi asal Prambon itu meminta agar lahan Flyover Gedangan dituntaskan tahun ini dan pembangunannya bisa dilakukan tahun depan.

"Sudah lama rakyat dihadapkan kemacetan dan keruwetan di perempatan Gedangan. Kalau Flyover Gedangan segera dioperasikan, paling tidak bisa mengurai kemacetan di sana," ujar Suyarno.

Ia menyebutkan, bertahun-tahun rakyat menjerit ketika lewat perempatan Gedangan dan sekitarnya. Terutama saat jam berangkat kerja dan pulang kerja. Rakyat harus dihadapkan kemacetan parah. Padahal jalan ini adalah jalan utama yang menghubungkan Surabaya de-



Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno.



Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat.



Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko.

ngan Sidoarjo. "Karena itu kami mendorong agar pembebasan lahan flyover ini segera dituntaskan," jelasnya.

Komentar senada disampaikan Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat. Politisi PDI-P asal Lebo, Sidoarjo kota itu mengatakan, sudah lama rakyat menjerit karena kemacetan arus lalu lintas di perempatan Gedangan dan sekitarnya.

"Karena itulah kita mendorong agar lahan Flyover Gedangan bisa dituntaskan tahun ini dan proyeknya bisa dimulai tahun depan," ujarnya.

Ia memaparkan, dari hari ke hari kemacetan di perempatan Gedangan dan sekitarnya kian parah saja. Sebab ini adalah jalan utama yang menghubungkan

Surabaya dengan Sidoarjo. Jumlah kendaraan dari hari ke hari juga terus bertambah. Karena itulah, salah satu solusi mengurai kemacetan di sana adalah dengan dibangun Flyover Gedangan.

"Pembangunannya lebih cepat lebih baik untuk mengurai kemacetan di sana. Begitu pembebasan lahan tuntas, Flyover Gedangan harus segera dibangun," urainya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko menambahkan, dulu sekitar Aloha Gedangan juga macet parah setiap hari. Kemacetan di sana terurai setelah dibangun Flyover Aloha.

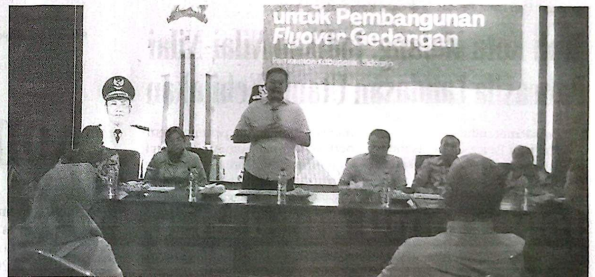
"Harapannya setelah Flyover Gedangan dioperasikan, titik simpul kemacetan di perempatan Gedangan bisa terurai," ujar poli-

tisi Partai Gerindra ini.

Ia juga menegaskan, wakil rakyat akan mengawal proyek ini. Mulai pembebasan lahan sampai pembangunan tuntas, akan terus diawasi. Pihaknya berharap proyek itu berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Tidak melenceng dan tidak motor.

"Biar Flyover Gedangan bisa segera dioperasikan dan rakyat bisa merasakan hasil pembangunan," jentrehnya.

Pemkab Sidoarjo sendiri sudah sosialisasi rencana pengadanan tanah untuk pembangunan Flyover Gedangan. Senin malam (18/5). Kegiatan yang digelar di Kantor Kecamatan Gedangan itu dihadiri ratusan warga pemilik lahan yang terdampak proyek.



Bupati Sidoarjo Subandi menargetkan pembebasan lahan Flyover Gedangan tuntas akhir 2026.

Dalam agenda tersebut, Pemkab Sidoarjo menargetkan pembebasan lahan selesai pada akhir 2026. Pembangunan flyover direncanakan dimulai pada 2027.

Hadir dalam pertemuan itu Bupati Sidoarjo Subandi didampingi Kepala Dinas PUBMSDA, Kepala Dinas Perkim CKTR, Camat, serta kepala desa. Turut hadir pula perwakilan BPN, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo, serta instansi terkait lain.

Subandi menegaskan, pembangunan Flyover Gedangan merupakan program prioritas

yang memerlukan keseriusan demi kepentingan masyarakat luas serta bagian dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Program ini juga telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Ada dukungan dari menteri hingga presiden.

Ia memastikan masyarakat tidak dirugikan dalam pembebasan lahan. Semua aset, baik tanah, bangunan, maupun tanaman, akan diganti sesuai nilai appraisal tertinggi.

"Kami pastikan masyarakat tidak dirugikan, justru diuntungkan. Semua akan diganti sesuai penilaian appraisal tertinggi

tanpa makelar. Pemkab juga tidak bisa memengaruhi, dan nilai tertinggi yang akan digunakan. Kalau bapak/ibu membantu, kami juga akan membantu panjenengan semua," tegasnya. (adv/kri/jok/ter)

### KEHILANGAN

HILANG STNK SEPEDA MOTOR  
HONDA REVO FT 110CC - TAHUN 2025  
WARNA HITAM - NOPOL - AG 4849 ABH  
ATAS NAMA - HERTAWAN  
Telp. 085234140104

HILANG STNK SEPEDA MOTOR  
HONDA VARIO 124CC - TAHUN 2021  
WARNA BIRU - NOPOL - W 4750 NCS  
ATAS NAMA - IKA BAROKAH  
Telp. 0891025164733

## MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

## 5.800 Kasus TBC Masih Menyerang Warga

### Sidoarjo, Bhirawa

Masyarakat Kabupaten Sidoarjo masih banyak yang terserang penyakit TBC atau Tuberculosis. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo jumlah kasus pada saat ini mencapai 5.800 kasus. Kabad Pengendalian dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr Djoko Setijono menyampaikan, dari 5.800 kasus itu capaian penanganan mencapai 91 persen atau sekitar 5.700 kasus.

Untuk mendukung target eliminasi TB tahun 2028 mendatang, Dinkes Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan layanan pengobatan TB di 170 fasilitas pelayanan kesehatan. "Sekaligus kita juga terus memperluas sarana pengobatan dan meningkatkan penemuan kasus suspect TB melalui screening masif di masyarakat," komentar dr Joko

Setijono, belum lama ini.

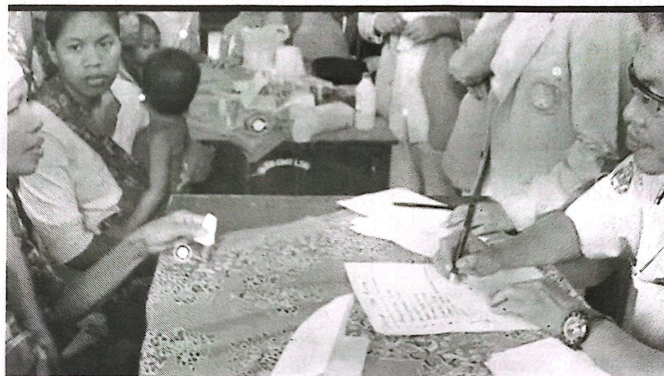
Selain itu, pembentukan Desa Siaga TB juga terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa dan kecamatan. Dinas Kesehatan Sidoarjo juga

mendorong pelaksanaan munisasi dasar lengkap serta gerakan menjaga kebersihan lingkungan rumah sebagai langkah pencegahan TB di masyarakat. "Sebelum target eliminasi TBC nasional yang ditetapkan

tahun 2030, semoga kita bisa lebih dulu bisa eliminasi TBC pada tahun 2028," ujarnya.

Peranan PKK membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dalam mencapai target eliminasi TBC pada tahun 2028 mendatang, sangat diharapkan. PKK di kabupaten Sidoarjo agar aktif melakukan deteksi dini, pendampingan pasien hingga edukasi lingkungan sehat di tengah masyarakat.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo, Sriatun Subandi, mensupport dan akan menggerakkan PKK agar melakukan peran strategis, sebagai motor penggerak sekaligus ujung tombak di tengah masyarakat dalam penanganan kasus TB. "Penanganan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Diantaranya seperti kasus TBC ini," ujarnya. [kus.ca]



Petugas Kesehatan Melakukan Pelayanan Jemput Bola Melayani Kesehatan Warga di Desa.

HARIAN  
**Bhirawa**  
Mata Jujur, Bicara Jernih

## Pemkab Genjot Investasi, Triwulan I 2026 Capai Rp 3,77 Triliun

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat iklim investasi daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati Sidoarjo Subandi, berbagai langkah dilakukan agar investasi di Kota Delta tetap tumbuh sekaligus memberi kepastian bagi pelaku usaha.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp 3,77 triliun dari target tahun ini yang sebesar Rp 15,7 triliun.

Kontributor terbesar berasal dari sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran senilai Rp 716,12 miliar. Disusul industri logam dasar dan barang logam bukan mesin Rp 675,22 miliar, industri makanan Rp 637,13 miliar, industri karet dan plastik Rp 416,73 miliar, serta industri kertas dan percetakan Rp 396,46 miliar.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo Ridho Prasetyo mengata-

kan, capaian itu didorong melalui strategi jemput bola kepada para pelaku usaha.

"Jadi kami melakukan jemput bola ke pelaku usaha-usaha untuk pendampingan pelaporan investasinya supaya satu datanya valid, yang kedua juga pelaporannya betul. Sehingga catatan realisasi investasi kami itu akhirnya valid semua," kata Ridho, Selasa (2/6).

Pendampingan itu dilakukan intensif pada masa pelaporan setiap triwulan. Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga aktif memfasilitasi berbagai kendala yang dihadapi investor, seperti terkait persoalan perizinan hingga koordinasi dengan dinas teknis.

"Kalau pelaku usaha ini juga kami fasilitasi kalau mereka punya kendala. Jadi kami tidak berhenti jika ada pelaku usaha yang izinya terkendala atau butuh fasilitasi koordinasi dengan dinas teknis dalam proses izinnya, itu kami fasilitasi," bebernya.

Ridho menjelaskan, dukungan

terhadap investasi juga mendapat perhatian langsung dari Bupati Sidoarjo Subandi. Pemantauan dilakukan rutin untuk memastikan hambatan di lapangan bisa segera diselesaikan.

"Jadi memang dipantau bagaimana kondisi-kondisi, kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha itu seperti apa. Terus apakah pendampingannya sudah dilaksanakan sampai dengan selesai. Itu rutin," jelasnya.

Tak hanya itu, DPMPTSP juga berkoordinasi dengan lintas OPD terkait, seperti Dinas P2CKTR hingga BPN untuk memetakan pelaku usaha yang sudah memiliki izin, termasuk fasilitasi dan koordinasi terkait sejumlah persoalan perizinan.

Pendekatan kolaboratif juga diterapkan untuk pelaku usaha mikro di tingkat kecamatan dan desa. Pemkab menghadirkan layanan jemput bola kolaborasi yang mencakup pendampingan perizinan, PIRT, sertifikasi halal, merek dagang hingga akses perbankan.

"Jadi ketika ada usaha mikro yang membutuhkan itu, kami melakukan sosialisasi atau jemput bola pelayanan di kecamatan. Sudah satu paket di situ," terang Ridho.

Di tingkat regional, Pemkab Sidoarjo juga terus berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan BKPM agar pelaporan maupun pengawasan investasi berjalan sinkron. Kolaborasi ini penting, mengingat Sidoarjo menjadi salah satu daerah industri penopang realisasi investasi di Jawa Timur bersama Gresik dan Pasuruan.

Melalui pendampingan yang konsisten, kemudahan layanan, hingga dukungan langsung dari Bupati Subandi, Pemkab Sidoarjo optimistis target investasi Rp 15,7 triliun pada 2026 dapat tercapai.



FOTO BERSAMA: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat

BMIST

(udi)



**PENGHARGAAN:** Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin menyerahkan penghargaan opini WTP kepada Bupati Sidoarjo, Subandi, di Kantor BPK Jatim, akhir pekan lalu

## Sidoarjo Raih Opini WTP atas Laporan Keuangan 2025

**SIDOARJO (BM)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan bahwa hal tersebut mencatatkan capaian 13 kali berturut-turut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2013.

"Capaian ini menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada," kata Subandi dalam keterangan yang diterima di Sidoarjo, Sabtu (30/5).

Menurutnya, opini WTP tersebut diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025, yang diserahkan serentak kepada 33 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat.

Menurut Subandi, keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ia mengatakan laporan hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi instrumen penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

"Capaian opini WTP ini harus terus dipertahankan, karena menjadi bentuk komitmen

men Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembelanjaan APBD secara transparan dan akuntabel," ujar Subandi.

Menurutnya, pencapaian tersebut juga menjadi indikator bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan secara tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Subandi menambahkan capaian opini WTP tersebut tak lepas dari hasil kerja bersama seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

"Kami akan terus menguatkan koordinasi dan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertahankan capaian opini WTP ini pada tahun-tahun mendatang," kata Subandi. (udi)

## DPDR Sidoarjo Dukung Pembangunan Flyover Gedangan Dipercepat

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Pemkab Sidoarjo menargetkan pembebasan lahan Flyover Gedangan tuntas akhir tahun 2026. Dengan begitu, flyover yang diharapkan bisa mengurai kemacetan Gedangan dan sekitarnya bakal dimulai tahun 2027.

Rencana ini mendapat dukungan dari DPRD Sidoarjo. Kalangan wakil rakyat mendorong penuntasan lahan Flyover Gedangan tahun 2026. Dan, mendesak agar proyek Flyover Gedangan dimulai tahun 2027.

Seperti dikemukakan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dari PDI-P Suyarno. Politisi asal Prambon itu meminta agar lahan Flyover Gedangan dituntaskan tahun ini dan pembangunannya bisa dilakukan tahun depan. "Sudah lama rakyat dihadapkan



Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko.

kemacetan dan keruwetan di empat Gedangan. Kalau Flyover Gedangan segera dioperasionalkan, paling tidak bisa mengurai kemacetan di sana," ujar Suyarno.

Ia menyebutkan, bertahun-tahun rakyat menjerit ketika lewat perempatan Gedangan dan seki-

tarnya. Terutama saat jam berangkat kerja dan pulang kerja. Rakyat harus dihadapkan kemacetan parah. Padahal jalan ini adalah jalan utama yang menghubungkan Surabaya dengan Sidoarjo. "Karena itu kami mendorong agar pembebasan lahan flyover ini segera dituntaskan," jelasnya.

Komentar senada disampaikan Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat. Politisi PDI-P asal Lebo, Sidoarjo kota itu mengatakan, sudah lama rakyat menjerit karena kemacetan arus lalu lintas di perempatan Gedangan dan sekitarnya. "Karena itulah kita mendorong agar lahan Flyover Gedangan bisa dituntaskan tahun ini dan proyeknya bisa dimulai tahun depan," ujarnya. (md/rus)

HARIAN  
BANGSA  
Koran Warga Jatim



## Subandi Bentuk Satgas Percepatan Dampak Lapindo

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Pemkab Sidoarjo membentuk Satgas Percepatan Penyelesaian Dampak Lumpur Lapindo. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang hingga kini masih menyisakan pekerjaan rumah, mulai dari ganti rugi lahan yang belum tuntas hingga persoalan legalitas data warga terdampak.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan persoalan dampak semburan lumpur Lapindo yang telah berlangsung hampir 20 tahun tersebut harus segera mendapatkan penyelesaian secara menyeluruh.

"Kami ingin persoalan yang sudah berlangsung hampir 2 dekade ini segera menemukan titik terang. Karena itu Pemkab Sidoarjo membentuk Satgas khusus untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang masih tersisa," kata Subandi kepada wartawan usai audiensi dengan PPLS, Selasa (2/6/2016).

Menurutnya, Satgas tersebut akan diisi oleh unsur-unsur yang memiliki kemampuan koordinasi dan komunikasi yang baik agar kinerjanya efektif.



Bupati Sidoarjo rapat bersama PPLS untuk menentukan langkah penanganan dampak Lumpur Lapindo.

Kepala Satgas akan berasal dari unsur Sekretariat Daerah. "Anggotanya tidak perlu banyak, tetapi harus efektif. Di dalamnya ada unsur pemerintah daerah, tim hukum, tiga camat wilayah terdampak, perwakilan BPLS, serta perwakilan korban atau pemilik lahan," ujarnya.

Subandi menjelaskan, salah satu fokus utama Satgas adalah melakukan verifikasi dan pendataan ulang

secara akurat. Sebab hingga saat ini masih ditemukan perbedaan data terkait status pembayaran ganti rugi maupun status kepemilikan lahan.

"Masih ada warga yang mengaku belum menerima pembayaran, sementara dalam data disebut sudah dibayar. Ada juga persoalan status lahan yang masih diperdebatkan. Ini yang harus kita benahi terlebih dahulu agar tidak ada lagi perbedaan data," jelasnya.

Pemkab Sidoarjo juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh data lengkap terkait SKL maupun Rencana Induk kawasan terdampak. Seluruh data tersebut nantinya akan menjadi dasar penyelesaian pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi.

Selain membentuk Satgas, Pemkab Sidoarjo juga berencana membuka posko layanan pengaduan di setiap kecamatan terdampak lumpur Lapindo. Posko tersebut akan menjadi tempat bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang hingga kini belum terselesaikan. "Kami ingin masyarakat memiliki saluran resmi untuk menyampaikan pengaduan. Dengan begitu setiap persoalan bisa didata dan ditindaklanjuti dengan baik," ungkapnya.

Subandi menegaskan, prioritas utama Satgas adalah menyelesaikan hak-hak warga yang hingga kini belum mendapatkan kepastian. Setelah itu, penanganan akan dilanjutkan pada berbagai persoalan lain yang masih berkaitan dengan dampak semburan lumpur. (md/rus)

HARIAN  
BANGSA  
Koran Warga Jatim



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Polresta Sidoarjo menggelar kegiatan bertajuk Polisi Sahabat Anak yang diikuti siswa-siswi KB-TK Kemala Bhayangkari.

## Kenalkan Tugas Polisi Melalui Program Polisi Sahabat Anak

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Polresta Sidoarjo menggelar kegiatan bertajuk Polisi Sahabat Anak yang diikuti siswa-siswi KB-TK Kemala Bhayangkari Kota Sidoarjo di Gedung Serbaguna Mako Polresta Sidoarjo, Selasa 2 Juni 2026.

Kegiatan ini bertujuan mengenalkan tugas dan peran Polri kepada anak-anak sejak usia dini dengan pendekatan yang edukatif dan menyenangkan. Melalui program tersebut, para peserta diajak memahami bahwa polisi merupakan *sahabat masyarakat* yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani.

Berbagai materi edukasi diberikan dalam kegiatan tersebut, mulai dari pengenalan tertib berlalu lintas, bahaya penyalahgunaan narkoba, atraksi kepiawaian polisi cilik, hingga pengenalan berbagai layanan kepolisian dari sejumlah satuan di lingkungan Polresta Sidoarjo. (md/rus)

# Ganti Rugi Belum Lunas, Korban Lumpur Terpaksa Kredit Rumah

**GANTI RUGI KORBAN LUMPUR SIDOARJO**

200 warga mengaku ganti rugi belum lunas

Untuk pengusaha ada 32 orang

Nilai ganti rugi belum dibayar Rp 1,5 triliun

Sumber: Forum Korban Lumpur Sidoarjo

## Pemkab Bentuk Satuan Tugas Percepatan Pembayaran

**SIDOARJO** - Pemkab bersama korban Lumpur Sidoarjo dan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) menggelar audiensi kemarin (2/6). Satuan tugas (Satgas) dibentuk untuk menuntaskan permasalahan terkait bencana tersebut. Termasuk, mempercepat ganti rugi korban yang belum lunas.

Salah satu korban Lumpur Sidoarjo, Heri Susanto mengatakan bahwa semburan lumpur telah menyusahkan keluarganya. Gara-gara itu, adiknya mengalami stroke. Heri terpaksa membeli rumah secara kredit karena ganti rugi tak kunjung dilunasi. Menurut Heri, keluarganya baru menerima pembayaran awal 25 persen sebesar Rp 444,6 juta. Uang tersebut

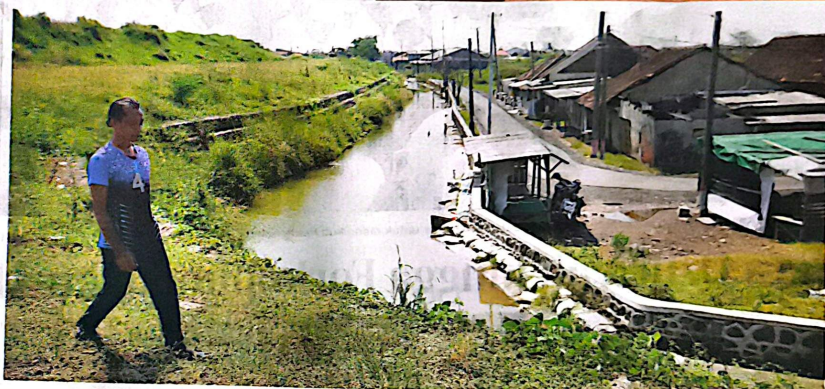
kemudian digunakan membeli rumah KPR di kawasan Pondok Mutiara. "Sisa sekitar Rp 1,778 miliar belum terbayar," kata Heri.

Dia menyebut, total aset keluarga yang terdampak terdiri atas tanah seluas 1.080 meter persegi dan bangunan 770 meter persegi. "Kami masih menunggu kejelasan pelunasan pembayaran," tambah Heri.

### Buka Pos Pengaduan

Pemkab membentuk Satgas Percepatan Penyelesaian Pembayaran Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo kemarin (2/6). Menurut Bupati Subandi, langkah tersebut untuk memastikan penyelesaian ganti rugi berjalan cepat. "Ini komitmen pemerintah mendampingi warga," katanya.

**RAWAN BENCANA:** Warga Desa Gempolsari belum mengungsi dan masih meng huni rumah di dekat tanggul Lumpur Sidoarjo.



**CARI SOLUSI:** Bupati Subandi (tengah) bersama Sekda Fenny Apridawati (kanan) memimpin audiensi terkait ganti rugi Lumpur Sidoarjo.

Dia menjelaskan, pemkab akan melakukan sinkronisasi data sebelum audiensi ke Jakarta. Verifikasi dilakukan agar tidak ada lagi tumpang tindih data pembayaran. Warga yang sudah menerima pembayaran diminta tidak kembali mengajukan klaim yang sama.

Selain itu, pemkab juga bakal membuka pos pengaduan di masing-masing kecamatan terdampak. Warga yang merasa belum menerima ganti rugi diminta membawa dokumen pendukung untuk diverifikasi ulang. Langkah itu dilakukan karena korban lumpur kini sudah menyebar

ke berbagai daerah.

Perwakilan PPLS Wilern mengakui masih ada persoalan pembayaran ganti rugi yang belum selesai. Pihaknya akan menyinkronkan data bersama tim satgas bentukan pemkab. "Nanti kami coba cocokkan lagi data yang ada," terangnya. (ful/hen)

# Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## ✓ Sebulan, 17 Pemotor Tewas Kecelakaan

### Mayoritas di Krian dan Balongbendo

**SIDOARJO** - Angka kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa di Kota Delta masih cukup tinggi. Selama Mei, tercatat ada 15 kecelakaan lalu lintas (laka lintas) yang menyebabkan 17 pengendara motor meninggal.

Dari 15 laka lintas, sebagian besar terjadi di Balongbendo. Ada enam laka lintas yang menyebabkan korban di kecamatan tersebut. Selain Balongbendo, laka maut juga terjadi di wilayah Krian dengan tiga kejadian dan tiga korban meninggal dunia.

Kapolsek Balongbendo Kopol Sugeng Sulistyono menjelaskan, sebagian laka lintas melibatkan pengendara motor. Penyebabnya

mirip. Yakni ada kesalahan pengguna jalan saat melintasi jalan raya.

"Ada yang bertabrakan saat menyalip kendaraan. Sopir tidak mewaspadai kendaraan dari depan," kata Sugeng. Selain memperbanyak sosialisasi, kata Sugeng, polisi memperbanyak pengawasan di jalur nasional. Ada sanksi untuk pengendara yang melanggar marka.

Sugeng mengimbau pengendara untuk berhati-hati saat melintasi jalan raya. Terutama para pelajar yang baru mengendarai motor. Sebab, ada banyak pelajar yang juga menjadi korban dalam laka lintas selama Mei. (eza/hen)



# Jawa Pos



ANGGER BONDAN/JAWA POS

**BERHENTI BEROPERASI: TPST Trompo Asri di Jabon ditutup karena pengelolaan tidak maksimal.**

## DLHK Tutup 25 TPST Bermasalah

**SIDOARJO** - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo menutup 25 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Penutupan tersebut dilakukan karena TPST tak beroperasi secara aktif serta pengelolannya bermasalah.

Plt Kepala DLHK Sidoarjo Arif Mulyono mengatakan, saat ini terdapat 210 TPST di Sidoarjo. Dari jumlah tersebut, sebanyak 185 TPST masih aktif beroperasi. Sedangkan 25 TPST lainnya tidak aktif. Penutupan dilakukan karena operasional

TPS belum memenuhi standar pengelolaan sampah.

"TPST itu bukan hanya tempat membuang sampah sementara. Namun, harus ada proses pemilahan dan pengolahan sebelum masuk TPA," katanya kemarin (2/6). Menurutnya, TPST wajib memiliki sistem pemilahan sampah organik dan anorganik. Selain itu, TPST juga harus didukung alat pengolahan dan pengelola yang aktif.

Namun di lapangan, masih ditemukan TPST yang hanya menampung sampah tanpa ada proses pengolahan. Bah-

kan ia menemukan TPST yang tidak memiliki mesin pencacah sampah dan pengolah kompos sehingga pengolahan tidak berjalan maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan sampah menumpuk dan memicu keluhan warga sekitar.

"Kalau pengelolannya tidak berjalan sesuai standar, tentu TPST tidak bisa dipertahankan operasionalnya," ujar Arif. DLHK juga menemukan sejumlah TPST tidak memiliki manajemen pengelolaan yang berjalan baik. Mereka tidak transparan dalam pengelolaan keuangan. (ful/hen)

# Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## 30 Pendaftar Lolos Seleksi Administrasi Calon Direksi PDAM

**SIDOARJO** - Nama calon direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo mulai mengerucut. Dari total 67 pendaftar, sebanyak 37 orang gugur di tahap administrasi. Sementara, 30 peserta lainnya berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan,

peserta yang tidak lolos umumnya karena tidak memenuhi syarat administrasi. "Ada berkas yang tak lengkap. Sebagian karena umurnya belum mencapai 35 tahun," kata Fenny. Dia mengatakan, pendaftar yang lolos akan mengikuti psikotes, tes kompetensi, hingga wawancara. Berdasar informasi, dari



Ada berkas yang tak lengkap. Sebagian karena umurnya belum mencapai 35 tahun."

**Fenny Apridawati**  
Sekda Sidoarjo

30 peserta yang lolos administrasi, mayoritas berasal dari kalangan profesional. Jumlahnya mencapai 21

orang. Sementara delapan peserta berasal dari sektor swasta. Sedangkan, satu peserta berasal dari kalangan

akademisi.

Fenny berharap proses seleksi dapat menghasilkan figur direksi yang profesional dan mampu meningkatkan pelayanan Perumda Delta Tirta ke depan. "Semoga nanti yang terpilih mampu meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik," katanya. **(ful/hen)**

# Jawa Pos

# Pipa Lumpur ke Kali Porong Stop Sementara

**SIDOARJO, SURYA** - Sejumlah pipa yang selama ini digunakan untuk mengalirkan material lumpur ke Kali Porong dilaporkan berhenti beroperasi sejak beberapa waktu terakhir. Pipa-pipa milik Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) itu tampak tidak aktif dan mengering di beberapa titik.

Kondisi tersebut memunculkan beragam spekulasi di masyarakat. Warga juga khawatirkan potensi luapan lumpur ke permukaan, terlebih saat curah hujan masih tinggi dalam beberapa waktu terakhir.

Bencana semburan lumpur Lapindo yang bermula sejak Mei 2006 kini telah memasuki tahun ke-20. Sedikitnya 16 desa di tiga kecamatan, yakni Tanggulangin, Porong, dan Jabon, telah tenggelam. Hingga kini, pengendalian volume lumpur sangat bergantung pada pengaliran ke Sungai Porong untuk menjaga kapasitas tampung di dalam tanggul.

PPLS membenarkan adanya penghentian sementara pada sebagian aktivitas pengaliran lumpur tersebut. William, perwakilan PPLS, menyebut kondisi itu terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran di tingkat nasional.

"Kebijakan efisiensi ini berdampak secara nasional, termasuk pada operasional kami," ujar William saat ditemui di Ruang Pertemuan (Opsroom) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Selasa (2/6).

Selain faktor anggaran, operasional pengaliran lumpur juga terikat sistem kontraktual. Ketika masa kontrak kerja sama berakhir dan kontrak baru belum diterbitkan, aktivitas pembuangan material padat lumpur otomatis terhenti sementara. Selama masa transisi, hanya air dari kawasan tanggul yang masih dialirkan ke Sungai



SURYA/M TAUFIK

## WILLIAM, PERWAKILAN PPLS.

Porong.

Meski kapasitas pengaliran menurun, PPLS memastikan masyarakat tidak perlu panik. William menegaskan kondisi tanggul hingga saat ini masih aman dan berada dalam pengawasan ketat selama 24 jam.

PPLS juga menyatakan sistem pemantauan darurat tetap berfungsi optimal. Di sejumlah titik kritis, perangkat peringatan dini atau early warning system (EWS) telah dipasang untuk mendeteksi perubahan atau penurunan stabilitas tanggul secara cepat.

"Kami memiliki instrumen peringatan dini yang terpasang di seluruh area tanggul. Jika terjadi kondisi kritis atau indikasi bahaya, sistem akan langsung memberikan informasi kepada petugas dan masyarakat," kata William.

PPLS mengimbau warga di sekitar kawasan terdampak untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. (ufi)



DIKRY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

**MANDEG:** Lahan yang terdampak pembangunan Frontage Road Waru-Sidoarjo masih dalam proses pembebasan.

## ■ Pembebasan Lahan Makam Hampir Tuntas Pembangunan Frontage Road Segera Dilanjutkan

PEMBANGUNAN Frontage Road (FR) Waru-Sidoarjo yang sempat terhenti kini mulai menemukan titik terang. Setelah terkendala proses pembebasan lahan makam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tinggal menuntaskan tahap pembayaran sebelum proyek strategis tersebut kembali dilanjutkan.

Bupati Sidoarjo Subandi memastikan persoalan yang selama ini menghambat pembangunan frontage road segera terselesaikan. Lokasi relokasi makam telah tersedia dan proses administrasi kini hanya menunggu rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Menurut Subandi, kendala utama muncul karena area makam yang terdampak proyek tidak masuk dalam penetapan lokasi (penlok) saat proses pembebasan lahan dilakukan sebelumnya. Akibatnya, nilai appraisal yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan lahan lain yang

● Ke Halaman 10



## 19 SPPG Dihentikan Sementara



EVALUASI: Salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sidoarjo yang dihentikan sementara operasionalnya karena belum memenuhi standar pengelolaan limbah.

### ■ Bupati: Momentum untuk Pembinaan

KOTA-Sebanyak 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Penghentian sementara tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi dan pembenahan fasilitas, terutama terkait ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta pemenuhan standar sanitasi yang dinilai be-

lum sesuai ketentuan.

SPPG yang terdampak tersebar di sejumlah kecamatan, yakni Sidoarjo, Candi, Waru, Tanggulangin, Buduran, Gedangan, Balongbendo, dan Tarik.

Menanggapi kebijakan tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo hanya memiliki fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program MBG.

Sementara kewenangan operasional maupun penghentian layanan sepenuhnya berada di pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional.

● Ke Halaman 10



### 19 SPPG Dihentikan...

"Tugas pemerintah daerah hanya melakukan pengawasan. Semua kebijakan terkait operasional maupun penghentian layanan merupakan kewenangan pemerintah pusat," ujar Subandi, Selasa (2/6).

Menurutnya, penghentian sementara itu harus dipandang sebagai langkah perbaikan agar pelaksanaan pro-

gram MBG benar-benar memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan bagi para penerima manfaat.

"Mudah-mudahan dengan ditutup sementara 19 SPPG ini ada pembenahan dan perbaikan. Yang terpenting anak-anak yang mengonsumsi MBG benar-benar mendapatkan manfaat dan kesehatannya terjaga, sehingga tidak terjadi lagi kasus keracunan seperti yang sempat

diberitakan," katanya.

Subandi kembali menegaskan bahwa keputusan untuk membuka maupun menutup operasional SPPG bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah hanya membantu dalam bentuk pengawasan. Soal operasional, termasuk penutupan dan pembukaan kembali, semuanya diatur oleh pemerintah pusat," tegasnya.

Meski demikian, Pemkab Sidoarjo tetap mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas Presiden RI.

"Mudah-mudahan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di Kabupaten Sidoarjo. Kami sebagai pemerintah daerah tentu memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaannya," ujarnya.

Menurut Subandi, program tersebut

memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045 melalui peningkatan kualitas gizi anak-anak sejak dini.

"Harapannya, program MBG dapat membantu membentuk generasi yang sehat dan berkualitas. Presiden menginginkan pada tahun 2045 anak-anak Indonesia memiliki masa depan yang cerah dan terbebas dari masalah gizi buruk," tuturnya. (dik/vga)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Pemkab Bentuk Satgas Percepatan Ganti Rugi Lumpur

### ■ Sekda Ditunjuk Jadi Ketua

KOTA-Hampir dua dekade setelah semburan lumpur Porong terjadi, persoalan ganti rugi bagi sebagian korban masih belum tuntas. Untuk mempercepat penyelesaiannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelesaian Ganti Rugi Korban Lumpur dengan menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai ketua tim.

Langkah tersebut diambil menyusul masih adanya ratusan berkas aset dan rumah warga terdampak yang belum mendapatkan pelunasan. Berdasarkan data Forum Korban Lumpur Sidoarjo, sekitar 200 berkas masih menunggu penyelesaian pembayaran. Dari jumlah itu, 32 berkas merupakan milik pelaku usaha, sedangkan sisanya milik warga terdampak.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, pembentukan satgas merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk membantu memper-



CARI SOLUSI: Bupati Sidoarjo Subandi saat menerima perwakilan PLS dalam audiensi di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Selasa (2/6).

cepat penyelesaian persoalan yang telah berlangsung sejak 2006.

"Biarkan ini betul-betul ada komitmen penyelesaian. Kita membentuk satgas percepatan penyelesaian lumpur dan ganti rugi," ujar Subandi

men penyelesaian. Kita membentuk satgas percepatan penyelesaian lumpur dan ganti rugi," ujar Subandi

usai audiensi dengan perwakilan Pusat Pengendalian Lumpur

● Ke Halaman 10



### Pemkab Bentuk Satgas...

Sidoarjo (PPLS) di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Selasa (2/6).

Menurut Subandi, satgas akan dipimpin Sekda dengan melibatkan berbagai unsur, mulai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Hukum, camat dari tiga keca-

matan terdampak yakni Porong, Jabon, dan Tanggulangin, PPLS, hingga perwakilan korban lumpur.

Ia menegaskan, legalitas dan validitas data menjadi prioritas utama sebelum pemerintah melangkah lebih jauh, termasuk saat melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

"Yang harus kita garis bawahi adalah legalitas data yang benar-benar

harus kita siapkan. Jangan sampai saat audiensi ke Jakarta masih ada tanah yang tumpang tindih atau tanah yang sebenarnya sudah dibayar tetapi masih diklaim belum dibayar. Itu tidak boleh terjadi," tegasnya.

Karena itu, seluruh data akan diverifikasi secara menyeluruh untuk menghindari klaim ganda maupun kesalahan pendataan. Verifikasi juga

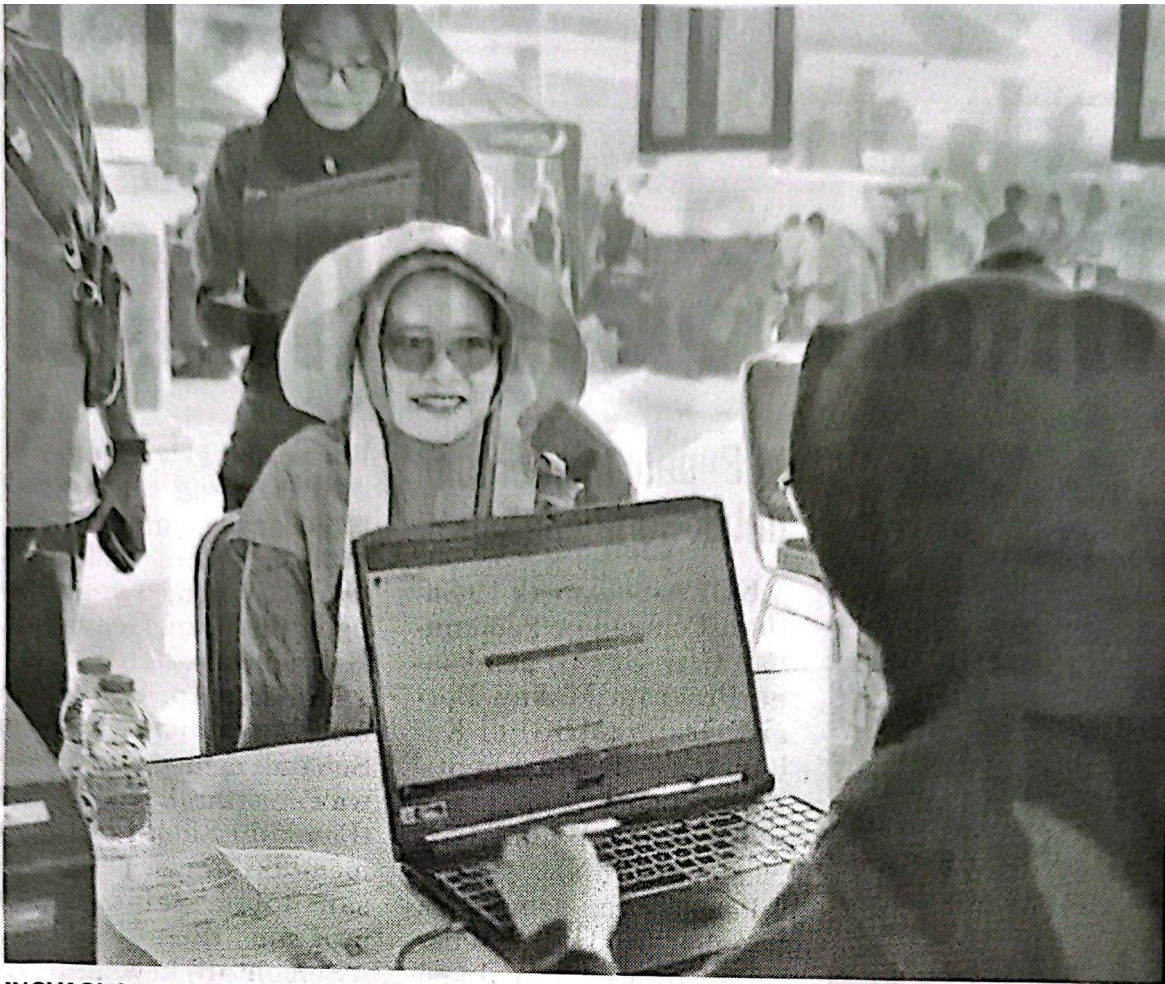
menakup aset yang masih memiliki persoalan administrasi, termasuk rumah yang masih berstatus Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"Kalau masih ada tanah atau rumah yang berstatus KPR, nanti kita koordinasikan dengan pihak terkait, termasuk pengembangnya. Kita ingin mengetahui secara detail aset mana saja yang terdampak lumpur agar datanya

benar-benar akurat," katanya.

Subandi berharap pendataan yang lebih rinci dapat menjadi dasar penyelesaian pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi secara menyeluruh tanpa menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. "Data harus benar-benar detail agar proses pembebasan lahan tidak menimbulkan tumpang tindih. Itu yang menjadi dasar kita," ujarnya. (dik/vga)





INOVASI: Layanan pembayaran PBB-P2 oleh BPPD Sidoarjo di kawasan CFD Alun-alun.

## Layanan PBB di CFD Disambut Antusias, Warga Merasa Lebih Praktis

KOTA-Kehadiran layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disediakan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo di kawasan Car Free Day (CFD) Alun-alun Sidoarjo mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Warga menilai layanan tersebut memudahkan pembayaran pajak karena dapat diakses saat hari libur tanpa harus mengganggu aktivitas pekerjaan pada hari kerja.

Salah satu warga Sidoarjo, Ineke, mengaku memanfaatkan keberadaan stan BPPD di Paseban Alun-Alun Sidoarjo untuk melunasi kewajiban pajaknya. Awalnya, ia hanya datang ke kawasan CFD seperti biasa, namun kemudian tertarik memanfaatkan layanan yang tersedia.

"Keren. Tadi iseng saja, sekalian bayar deh," ujarnya saat ditemui di lokasi.

Ineke menjelaskan, dirinya memiliki lima objek pajak. Empat di antaranya telah dibayarkan sebelumnya, sedangkan satu objek pajak lainnya dilunasi melalui layanan BPPD yang hadir di CFD.

Menurutnya, layanan pembayaran pajak pada hari libur sangat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus administrasi pada hari kerja.

"Ya, baru tahu ada layanan ini. Saya merasa terbantu karena tidak perlu ke Bank Jatim. Kalau hari kerja saya harus izin dulu karena bekerja," katanya.

Selain kemudahan akses, warga juga dimudahkan dengan tersedianya metode pembayaran digital melalui QRIS. Dengan sistem tersebut, masyarakat tidak perlu membawa uang tunai saat melakukan transaksi pembayaran pajak.

"Pakai QRIS, Pak. Nggak perlu bawa uang tunai," ungkapnya. *(dik/vga)*

# Wabup Beri Dukungan Finalis Putri Pertiwi Jatim 2026 Asal SMPN 6

KOTA-Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana memberikan dukungan penuh kepada Angkin Shalqiamna Kusuma Asfandhy, siswi SMP Negeri 6 Sidoarjo yang berhasil lolos sebagai finalis ajang Putri Pertiwi Jawa Timur 2026. Dukungan tersebut disampaikan Wabup Mimik saat menerima informasi keberhasilan Angkin melaju ke tingkat provinsi, Selasa (2/6).

Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan prestasi yang membanggakan sekaligus bukti bahwa generasi muda Sidoarjo mampu bersaing dan berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.

“Selamat kepada Angkin. Tampilkan yang terbaik dan harumkan nama Kabupaten Sidoarjo di ajang Putri Pertiwi Jawa



**PRESTASI:** Wabup Sidoarjo Mimik Idayana memberikan dukungan penuh kepada Angkin Shalqiamna Kusuma Asfandhy.

Timur 2026,” ujar Mimik.

Ia berharap Angkin tidak hanya mampu menunjukkan penampilan yang baik, tetapi juga memperlihatkan kecerdasan, wawasan, kepribadian,

serta kepedulian sosial yang menjadi nilai penting dalam ajang tersebut.

Menurut Mimik, keberhasilan Angkin dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya untuk terus

mengembangkan potensi diri dan berani berkompetisi di berbagai bidang.

“Prestasi ini diharapkan dapat memotivasi pelajar lain di Sidoarjo untuk terus berkarya, berprestasi, dan membawa nama baik daerah,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, lanjut Mimik, berkomitmen memberikan dukungan kepada generasi muda yang memiliki prestasi dan potensi di berbagai bidang, baik akademik maupun nonakademik.

Dengan dukungan pemerintah daerah serta doa masyarakat Sidoarjo, Angkin diharapkan mampu meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Sidoarjo dalam ajang Putri Pertiwi Jawa Timur 2026. (sur/vga)